

**PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA
PENCEGAHAN DINI KORUPSI DI INDONESIA**

Rico Septian Noor, S.H.,M.H
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Abstrak

Pendidikan Karakter merupakan hal yang sangat penting terutama dalam membentuk kepribadian seseorang dari lahir sampai dengan dewasa kelak. Pendidikan Karakter anti korupsi salah satu upaya yang semestinya dilakukan di Negara Indonesia bahkan sejak dini karena upaya pemberantasan korupsi yang sangat masif sekalipun tidak akan cukup apabila tidak ditunjang dengan berbagai pencegahan yang efektif. Tulisan ini mencoba menganalisa terkait dengan berbagai pola dan konsep pembelajaran terutama di Negara yang sudah maju serta mencoba mengadaptasi konsep yang sama dalam sistem Pendidikan Di Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual sehingga didapat kesimpulan bahwa sampai sekarang fokus pendidikan karakter di Indonesia tidak dimulai sejak dini serta tidak menyentuh langsung ke pendidikan karakter anti korupsi.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Pencegahan, Korupsi

Abstract

Character education is very important especially in shaping a person's personality from birth to adulthood. Anti-corruption Character Education is one of the efforts that should have been carried out in Indonesia even early because efforts to eradicate corruption are very massive even if it will not be enough if it is not supported by effective prevention. This paper tries to analyze the various patterns and concepts of learning, especially in developed countries, and tries to adapt the same concepts in the Indonesian education system. This writing uses normative research with a conceptual approach so that it can be concluded that until now the focus of character education in Indonesia does not begin early and does not touch directly on anti-corruption character education.

Keywords : Character Education, Prevention, Corruption

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia dari sisi karakter yang pada saat ini menjadi salah satu perhatian besar pemerintah Indonesia, dengan dijadikannya sebuah gerakan revolusi mental oleh Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya dan berlanjut sampai dengan sekarang, Revolusi mental yang bertujuan untuk merevolusi mentalitas warga negara agar berkarakter, santun berbudi pekerti yang

baik serta gotong royong. Termasuk salah satu poin tujuan dari revolusi mental yang selaras yaitu Pendidikan karakter sebagai upaya membangun manusia sebagai generasi muda bangsa yang bermoral dan anti korupsi sebagai salah satu poin penting perubahan di dalam bangsa ini, tentu hal ini harus disambut baik dan dirumuskan dalam langkah-langkah sistematis dan komprehensif. Pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan

nilai-nilai anti korupsi harus terus dikembangkan dalam bingkai utuh Sistem Pendidikan Nasional sebagai rujukan normatif dan pedoman pendidikan di Negara Indonesia karena Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan sumber daya Manusia. (Setiawati, 2017)

Jika melihat pada saat ini merupakan situasi di mana bangsa Indonesia dalam posisi perubahan menuju puncak peradaban dunia. Dalam proses perubahan yang semakin cepat itu, maka pendidikan karakter merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, hanya bangsa yang memiliki karakter kuatlah yang mampu menangkal berbagai dampak negatif dalam mencapai puncak peradaban dunia termasuk mencegah terjadinya Korupsi. Perhatian pemerintah yang lebih besar terhadap pendidikan karakter sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, melainkan menempatkan pendidikan karakter pada proporsi yang sebenarnya agar menjadikan generasi muda tidak hanya cerdas dan berilmu namun menjadi generasi yang bermoralitas dan berkarakter yang baik khususnya karakter anti Korupsi. (Triningsih, 2017) Sebab, bangsa Indonesia di masa depan akan diteruskan oleh generasi muda yang menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan. Jika pendidikan yang tidak berkarakter dan

bermoral yang baik diberikan tidak mampu menjawab kebutuhan tersebut maka niscaya bangsa Indonesia akan kehilangan harapan di masa depan.

Pendidikan karakter dikatakan adalah sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*) selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis. (Lickona, 2016) Pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi. Proses pendidikan karakter tentu juga akan melibatkan berbagai aspek perkembangan peserta didik, seperti kognitif, konatif, afektif, serta psikomotorik sebagai suatu keutuhan (holistik) dalam konteks kehidupan kultural. (Lickona, 2016) Membentuk karakter yang baik tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang instan dan singkat. Pendidikan karakter untuk mewujudkan pembentukan moral yang baik tentu harus menyatu dalam proses pembelajaran yang mendidik, disadari oleh guru sebagai tujuan pendidikan di tingkat paling mendasar, dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang transaksional dan bukan instruksional, dan dilandasi pemahaman secara mendalam terhadap perkembangan peserta didik.

Pendidikan karakter juga dikatakan adalah pendidikan sepanjang hayat, sebagai proses perkembangan ke arah manusia yang kaafah (manusia paripurna).

(Martin, 2004) Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan keteladan dan sentuhan bahkan dimulai sejak dini sampai dewasa. Seperti yang disampaikan oleh Theodore Roosevelt bahwa jika mendidik seseorang hanya untuk berpikir dengan akal tanpa disertai pendidikan moral berarti membangun suatu ancaman dalam kehidupan masyarakat. Artinya dibutuhkan suatu pendidikan karakter bagi anak didik tidak hanya kemampuan dan keterampilan semata. (Coleman, 1995) Periode yang paling sensitif dan menentukan dalam hal pendidikan karakter pertama kali adalah pendidikan dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua. Pola asuh atau *parenting style* adalah salah satu faktor yang secara signifikan turut membentuk karakter anak ke depan. Sejauh mana orang tua memberikan contoh yang baik maka tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi karakter anak kelak, contoh sederhana kejujuran yang diajarkan orang tua sejak dini tentu akan membentuk karakter anak di masa depan karena berdasarkan penelitian sejak lahir sampai usia 3 Tahun anak memiliki kepekaan sensoris dan daya pikir yang sudah mulai dapat menyerap pengalaman-pengalaman melalui sensorinya, usia satu setengah Tahun sampai kira-kira 3 tahun mulai memiliki kepekaan bahasa dan sangat tepat untuk mengembangkan bahasanya

bercakap dan berbicara. (Kirschenbaum, 1995) Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan utama dan pertama bagi anak, yang tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga, untuk membangun sebuah *community of learner* tentang pendidikan anak, perlu menjadi sebuah kebijakan pendidikan dalam upaya membangun karakter bangsa secara berkelanjutan.

Secara umum orang-orang memandang bahwa keluarga merupakan sumber pendidikan moral yang paling utama bagi anak-anak. Orang tua adalah guru pertama mereka dalam pendidikan moral. Mereka jugalah yang memberikan pengaruh paling lama terhadap perkembangan moral anak-anak di sekolah, para guru pengajar tentu akan berubah setiap tahunnya, tetapi di luar sekolah anak-anak tentunya memiliki sedikitnya satu orang tua yang memberikan bimbingan dan membesarkan mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antar orang tua dan anak pun dipenuhi dengan berbagai perbedaan khusus dalam hal emosi, yang menyebabkan anak-anak merasakan dicintai dan dihargai atau tidak dicintai dan dikesampingkan. Akhirnya, para orang tua berada dalam posisi yang mengharuskan mereka untuk mengajarkan nilai moral sebagai bagian dari sebuah

pandangan tentang dunia yang lebih besar yang menawarkan sebuah pandangan tentang arti hidup dan alasan-alasan utama sebagai pengantar sebuah kehidupan yang bermoral. Semua hal tersebut berdasarkan pada sejumlah penelitian yang merujuk pada kekuatan dari pengaruh orang tua.

Dalam sebuah studi, para orang dewasa yang berpegang teguh pada keyakinan mereka akan benar atau salah ketika dihadapi dengan sebuah dilema moral meminta para orang tua untuk dapat membimbing anak-anak mereka secara serius ketika menemukan suatu sikap penyimpangan moral. Para orang tua yang sadar akan hal tersebut akan menyikapinya dengan berbeda ketika anak-anak mereka ketahuan melakukan suatu tindakan yang mengecewakan ataupun menyakiti orang lain dibandingkan dengan orang tua yang tidak. Seberapa baik orang tua mendidik anak-anak mereka untuk menghormati suatu otoritas tentunya akan menjadi fondasi untuk perkembangan moral si anak di masa yang akan datang.

Para orang tua yang memberikan pendidikan moral dengan efektif, berdasarkan indikasi penelitian adalah mereka yang “*autoritatif*” membimbing anak-anak untuk patuh kepada mereka. (Savitri, 2019) Namun, juga memberikan alasan yang jelas mengenai apa yang orang tua inginkan dari anak-anaknya sehingga

anak-anak dapat meresapi logika dari tindakan yang bermoral dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab berdasarkan inisiatif mereka sendiri bukan sebagai sebuah paksaan. Sebaliknya, baik orang tua yang “*permisif*” (yang enggan membuat aturan dan lebih bersikap mengancam terhadap penyimpangan yang terjadi) maupun para orang tua yang “*authoritarian*” (orang tua yang terlalu banyak mengontrol anak tetapi tanpa memberikan alasan yang jelas terhadap aturan yang berlaku dan cenderung bersifat kaku) menunjukkan hasil yang sama, yaitu keduanya tidak memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di segala usia dalam meningkatkan sikap pengendalian diri dan memunculkan anak-anak yang tidak memiliki tanggung jawab secara sosial. (KPK, 2016)

Perasaan cinta yang diberikan orang tua, sama seperti otoritas, yang bersifat sangat mendasar. Pada akhirnya, kualitas pengasuhan orang tua merupakan dasar pengukuran yang digunakan ketika seorang anak terlibat dalam masalah hukum. Meskipun sekolah mampu meningkatkan pemahaman awal para siswanya ketika mereka ada di sekolah, kemudian bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa sekolah mampu melaksanakan hal tersebut. Sikap baik yang dimiliki oleh anak-anak tersebut akan

perlahan menghilang jika nilai-nilai yang telah diajarkan di sekolah tersebut tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan orang tua di rumah. Dengan alasan tersebut, sekolah dan keluarga haruslah seiring dalam menyikapi masalah yang muncul seperti halnya persoalan besar Korupsi di Indonesia. Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak misalnya saja pihak sekolah dan orang tua, kekuatan yang sesungguhnya dapat dimunculkan untuk meningkatkan nilai moral anti korupsi sebagai seorang manusia dan untuk mengangkat kehidupan moral di negara Indonesia.

Dengan harapan tersebut pula, banyak sekolah yang sudah mulai melihat orang tua sebagai *partner* penting dalam proses pendidikan moral. (Hamzah, 2015) Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah untuk mengajukan nilai-nilai yang sekolah ajarkan kepada anak-anak mereka, mendapat masukan, dan bersama-sama membuat komitmen yang memiliki tujuan yang sejalan misalnya dengan berkolaborasi dalam bentuk kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan karakter anti korupsi, hal demikian sebaiknya dilakukan di Indonesia sebab persoalan Korupsi sebagai kejahatan luar biasa ini tidak bisa dihadapi dengan upaya yang biasa-biasa saja namun harus dilakukan dengan upaya sinergis dan

komprehensif seluruh komponen bangsa ini.

Pendidikan Karakter Anti Korupsi harus ditanamkan sejak dini bahkan sejak dalam lingkup keluarga karena pendidikan karakter anti Korupsi bersifat *multilevel* dan *multi-channel* sebab tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh sekolah saja. Pembentukan karakter yang bermoral dan anti Korupsi tentu perlu keteladanan, perilaku nyata dalam *setting* kehidupan otentik dan tidak bisa dibangun secara instan. Oleh karena itu, pendidikan karakter Anti Korupsi harus menjadi sebuah gerakan moral yang bersifat holistik, melibatkan berbagai pihak dan koneksi yang ada, dan berlangsung dalam *setting* kehidupan alamiah. Namun, yang patut dihindari pula jangan gerakan anti korupsi ini sampai menjadi gerakan dan ajang politik yang pada akhirnya hanya akan membentuk perilaku-perilaku formalistik pragmatis yang berorientasi kepada asas manfaat sesaat, yang justru akan semakin merusak karakter dan martabat bangsa Indonesia. Pendidikan karakter Anti Korupsi jika dianalogikan seperti mengukir dan memberikan sentuhan pada suatu benda agar barang atau benda tersebut memiliki nilai lebih seperti sebuah karya seni sama halnya dengan membentuk manusia yang berkarakter anti korupsi di Indonesia agar

menjadi manusia yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian dengan metode Yuridis Normatif (*Legal Research*) yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penulisan ini digunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) melihat berbagai konsep dan kebijakan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum itu kemudian disusun secara sistematis dikaji secara mendalam untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Jika melihat perkembangan teknologi pada saat ini yang telah sampai pada era Revolusi Industri 4.0 yang memiliki berbagai dampak perubahan tidak hanya dampak positif tapi juga berbagai dampak negatif lainnya. (KPK, 2016) Sejalan dengan perubahan yang begitu cepat tersebut, pemikiran mengenai urgensi pendidikan karakter tersebut kini telah berubah. Dengan mengangkat masalah-masalah moral yang muncul, mulai dari masalah ketamakan, perbuatan curang, ketidakjujuran hingga tindak

kekerasan. Pandangan baru tentang konsep pendidikan moral pun akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Saat ini di seluruh dunia, mulai dari masyarakat secara individu sampai dengan organisasi kemasyarakatan, baik kaum liberal maupun konservatif telah meminta sekolah-sekolah untuk melibatkan peran pendidik moral sebagai bagian dari pendidikan anak-anak di usia Sekolah. Seperti di Indonesia upaya menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian dari pembelajaran di Sekolah telah pula dilakukan dengan berbagai istilah misalnya pendidikan moral, pendidikan Religijs dan berbagai istilah lainnya, namun sampai sekarang masih belum ada yang benar-benar menyentuh persoalan Korupsi secara tersendiri sebagai mata pelajaran berupa Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Karena patut pula disadari bahwa membentuk individu yang cerdas saja tidak lah cukup namun diperlukan pula individu yang berperilaku dan bermoralitas yang baik.

Jika berbicara sejarah maka sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Plato para pembuat kebijakan telah membuat suatu formulasi kebijakan mengenai pentingnya pembentukan karakter atau pendidikan moral yang dibuat sebagai bagian dari pendidikan di tingkat sekolah. Mereka telah mendidik karakter masyarakat dengan pendidikan inteligensi,

mendidik kesopanan setara dengan pendidikan literasi, mendidik kebajikan setara dengan pendidikan ilmu Pengetahuan. Mereka pun telah mencoba untuk membentuk masyarakat yang dapat menggunakan inteligensi mereka untuk memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi dirinya sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang membangun kehidupan yang lebih baik.

Fenomena korupsi di Indonesia sudah semakin memprihatinkan. Gejala dan perbuatannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta masuk ke seluruh lapisan struktur birokrasi, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi juga semakin bertambah besar. Keterpurukan perekonomian diyakini sebagai resultan dari adanya tindak pidana korupsi yang sistematis dan meluas. Terutama yang dilakukan oleh pejabat pada badan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sistematisnya tindak pidana korupsi sebagai bagian kejahatan terstruktur yang sangat utuh terakar, kuat dan permanen sifatnya, sehingga korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada. Sebagai contoh, sampai dengan sekarang tak terhitung jumlahnya oknum Kepala Daerah, mulai

dari tingkat Kepala Desa, Bupati, Gubernur, pejabat publik bahkan penegak hukum sekalipun di Negeri ini yang tersangkut persoalan Korupsi baik di tingkat daerah sampai pada korupsi yang berskala besar ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. (Nasional, 2013) Padahal jika melihat rekam jejak para oknum Koruptor tersebut yang ternyata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam hal ini artinya pendidikan yang tinggi tidak serta merta menjamin individu tersebut berperilaku baik pula dalam jabatannya.

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio-corruptus*, dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan. Tindak Pidana Korupsi secara jelas dan nyata telah merugikan keuangan negara, menyebabkan berbagai program pembangunan menjadi terhambat, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tersendat. Beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa praktik tindak pidana korupsi ini semakin menyebar dan berlangsung dimanapun, tidak hanya di lembaga negara bahkan

sudah merambah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga jasa keuangan dan perbankan serta sektor lainnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa potensi kerugian negara sangat besar atas tindak pidana yang semakin masif terhitung tidak kurang dari 203, 9 Trilyun Rupiah kerugian Negara di Indonesia akibat korupsi (Nelson, 2019), padahal tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak henti-hentinya telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum, baik oleh Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Berbagai kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam rangka penyelamatan kekayaan negara yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia saat ini seperti diketahui lebih cenderung ke arah represif. (Rohendi, 2011) Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat. Upaya represif atau penal (dengan pemidanaan) memang telah memberikan penderitaan bagi pelaku, namun ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya represif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa cara represif memiliki "keterbatasan" dan mengandung beberapa "kelemahan" sehingga fungsinya seharusnya tidak dijadikan upaya tunggal

dalam melakukan pencegahan dan atau pemberantasan tindak pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah perbaikan dengan strategi yang mampu menjawab permasalahan kronik Korupsi tentu sangat dibutuhkan agar upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan negara ini selain dengan penegakan hukum (represif) dapat dilakukan juga dengan upaya pencegahan (preventif). (Wikipedia, 2013) Salah satu upaya pencegahan Korupsi menurut penulis perlu dilakukan pula dengan berbagai upaya preventif lainnya seperti dalam tulisan ini yaitu upaya pendidikan karakter Anti Korupsi yang sejak dini diberikan dan ditanamkan dalam diri generasi muda di Indonesia.

Jika melihat berbagai persoalan terkait dengan merosotnya nilai-nilai moralitas sebagai salah satu bagian dari cikal bakal munculnya Korupsi yang akhir-akhir ini semakin mengemuka bahkan lebih parahnya hal tersebut juga sebagian besar dilakukan oleh remaja dan anak di Indonesia yang *notabene* merupakan cikal bakal penerus bangsa kelak. Oknum siswa di Indonesia yang memukul guru dan bahkan melakukan tindakan tidak terpuji lainnya kepada guru yang seharusnya menjadi panutan bagi siswa di Sekolah dan berbagai kasus

dekandensi moral lainnya. Demikianlah gambaran-gambaran yang muncul yang memberikan contoh bahwa betapa perilaku anak-anak pada masa sekarang telah berubah lebih jauh dalam hal keterlibatan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat nantinya. Perubahan-perubahan tersebut juga tidak hanya tergambar dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh remaja, tetapi juga dari berbagai bentuk ucapan dan tindakan tidak terpuji yang juga sudah mulai marak dilakukan oleh anak-anak yang dari segi usia masih sangat muda.

Pada saat yang bersamaan, berbagai godaan terhadap ketamakan dan sikap materialisme juga menjadi ancaman yang melanda kehidupan di Indonesia pada saat ini. Uang secara cepat dapat mengontrol kehidupan bermasyarakat dan menjadi acuan pembentukan nilai dan tujuan bagi masyarakat dan para remaja pada saat ini. Harga berbagai kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan mahal membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk memenuhinya. Kebutuhan akan uang pada akhirnya menjadi dasar kebenaran untuk mengesampingkan atau bahkan menantang aturan yang berlaku sehingga tak jarang perbuatan Korupsi seakan tidak pernah habis di Negera Indonesia. Pengetahuan moral yang paling mendasar pun saat ini tampak perlahan menghilang dari

kehidupan manusia yang berbudaya seperti halnya di Indonesia. Membandingkan di Negara lainnya berdasarkan survei, dua pertiga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan berbohong jika hal tersebut berurusan dengan masalah keuangan. Perwakilan dari *Baltimore School*, James Sarnecki mengatakan bahwa telah terbiasa mengangkat *Golden Rule* ketika menerangkan tentang masalah kedisiplinan. Para pendidik akhirnya mulai menyebut dengan istilah “kebutaan moral” yang mereka simpulkan dari kehidupan remaja saat ini. (Liestyasari, 2013)

Menumbuhkembangkan Karakter dan Pendidikan Anti Korupsi sejak dini

Pendidikan karakter mulai ramai dibicarakan sejak tahun 1990 an . Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya melalui karyanya yaitu “ *The Return of Character Education*” sebuah buku yang menyadarkan dunia Barat bahwa pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Karakter sebagaimana didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin, mengandung tiga unsure pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*Knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). (KPK, 2016) (Pendidikan karakter Anti Korupsi sebagai dasar dari

pembentukan sebuah negara demokrasi seperti halnya di Indonesia juga tak kalah penting dalam usaha mencapai suatu keberhasilan kehidupan negara yang demokratis. Logikanya, paham demokrasi sendiri adalah pemerintahan oleh rakyat, maka rakyat pula yang bertanggung jawab dalam membentuk suatu kehidupan dalam konteks kebebasan bagi mereka sendiri. Hal itu berarti masyarakat seharusnya atau sedikitnya memiliki sebuah sikap yang berbudi luhur yang baik. Masyarakat harus memahami dan berkomitmen bahwa pendidikan karakter Anti Korupsi sebagai dasar demokrasi adalah menghargai hak-hak setiap individu, selalu bersikap jujur, menghormati berbagai aturan hukum yang berlaku, secara sukarela terlibat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, dan memiliki kepedulian untuk bersikap baik kepada sesama manusia dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Loyalitas terhadap kesopanan dalam berdemokrasi tersebut harus sudah mulai ditanamkan sejak dini, seperti yang diutarakan oleh Thomas Jefferson. (Lickona, 2016)

Program pendidikan anti korupsi yang dikembangkan nantinya harus berdasarkan pada dasar hukum moral dapat dilaksanakan dalam dua nilai moral yang utama, yaitu sikap hormat dan bertanggung jawab. (Lickona, 2016) Nilai-nilai tersebut mewakili dasar moralitas

utama yang berlaku secara universal. Nilai moral tersebut memiliki tujuan, nilai yang nyata, di mana nilai tersebut mengandung nilai-nilai baik bagi semua orang baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nilai-nilai rasa hormat dan tanggung jawab tersebut sangatlah diperlukan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Hormat dan tanggung jawab merupakan yang menjadi dasar landasan yang mengharuskan para pendidik untuk memberikan pendidikan karakter seperti anti korupsi tersebut untuk membangun manusia-manusia yang secara etis berilmu dan dapat memposisikan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang juga memiliki nilai-nilai moral dan bertanggung jawab.

Rasa hormat merupakan salah satu bagian penting bagi nilai moral seorang individu. Pada konteks tumbuhnya rasa hormat berarti seseorang individu telah menunjukkan penghargaan bukan hanya terhadap harga diri orang lain ataupun hal lain selain diri kita namun juga pada pekerjaan dan berbagai bidang kehidupan. Terdapat tiga hal yang menjadi pokok, yaitu penghormatan terhadap diri sendiri, penghormatan terhadap orang lain, dan penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan dan lingkungan yang saling menjaga satu sama lain. Penghormatan terhadap diri sendiri, mengharuskan kita

untuk memperlakukan apa yang ada pada hidup kita sebagai manusia yang memiliki nilai secara alami. (Lickona, 2016) Penghormatan terhadap orang lain, mengharuskan kita untuk memperlakukan semua orang bahkan orang-orang yang kita benci sebagai manusia yang memiliki nilai tinggi dan memiliki hak yang sama dengan diri kita sebagai individu. Rasa hormat tentu menjadi hal yang penting untuk terus ditumbuhkembangkan sebagai nilai antipati terhadap Korupsi, terutama di tingkat Pendidikan di Negara Indonesia yang dapat dimulai dari tingkat pendidikan dasar sampai menengah, sebagai contoh perbandingan misalnya bagaimana budaya Negara Jepang begitu menghargai dan memiliki rasa hormat yang tinggi tidak hanya kepada sesama manusia bahkan pada hal sederhana misalnya tata cara pada saat makan misalnya rasa hormat dan menghargai ditunjukkan dengan cara tidak menggunakan *Handphone* dan hanya fokus pada makanannya saja.

Tentu saja hal-hal sederhana kaitan dengan rasa hormat tersebut patut ditiru. Hal tersebut merupakan intisari dari *Golden Rule* (“Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri”). (Kirschenbaum, 1995) Berdasarkan penghormatan yang kompleksnya jaringan kehidupan ini maka tindakan kasar yang dilakukan terhadap

hewan pun menjadi sesuatu yang dilarang sehingga kita diharuskan untuk berlaku baik dengan cara melindungi alam dan lingkungan ketika kita hidup dari rapuhnya ekosistem dan segala kehidupan ini bergantung di dalamnya. Pada akhirnya rasa hormat akan membentuk pribadi individu di Indonesia nantinya agar memiliki nilai-nilai keadilan sebagai bagian nilai dari rasa hormat yang dilibatkan dalam interaksi kehidupan dalam bentuk sekecil apapun misalnya.

Selain itu memupuk rasa tanggung jawab juga merupakan suatu bentuk lanjutan dari rasa hormat. Jika kita menghormati orang lain, berarti kita menghargai mereka. Jika kita menghargai mereka, berarti kita merasakan sebuah ukuran dari rasa tanggung jawab kita untuk menghormati kehidupan mereka. Tanggung jawab, secara literal berarti “kemampuan untuk merespons atau menjawab.” Itu artinya, tanggung jawab berorientasi terhadap orang lain, memberikan bentuk perhatian, dan secara aktif memberikan respons terhadap apa yang mereka inginkan. Tanggung jawab menekankan pada kewajiban positif untuk saling melindungi satu sama lain. Rasa hormat, jika dilihat dari perbandingannya, lebih menekankan pada kewajiban kita yang terkadang berbentuk kalimat negatif. Sebagian besar dari isinya menyangkut apa

yang tidak boleh dilakukan. Hal tersebut biasa disebut “moralitas larangan”. Hal yang terburuknya adalah mengatakan, “kekuatan dari pemikiran negatif.”

Seorang filsuf, John Moline, mengacu pada pentingnya sikap moralitas tersebut yang meminta kita melaksanakan kewajiban tentunya seperti “*Thou shalt not murder*” sebenarnya memiliki makna serupa dengan, “*love your neighbour*” yang lebih berbentuk positif. Sebuah daftar nilai moral ‘tidak boleh,’ sebenarnya belum cukup. Sebuah etika bertanggung jawab memberikan makna nilai moral yang seharusnya. Ketika penghormatan mengatakan “jangan menyakiti,” sesungguhnya tanggung jawab mengatakan “berilah pertolongan? Sebenarnya, ketika mengatakan “*love your neighbour*” dan “*think others*” (pedulilah dengan orang lain)” bersifat lebih terbuka pernyataan-pernyataan tersebut tidak meminta kita untuk menghitung telah berapa banyak pengorbanan yang harus kita lakukan untuk keluarga, untuk bersikap dermawan, untuk bekerja bagi masyarakat, atau untuk selalu ada bagi mereka yang membutuhkan. Akan tetapi, sebuah tanggung jawab moral secara tidak langsung meminta kita untuk “mengorbankan” sesuatu. (Wikipedia, 2013)

Di luar hal yang membebani tersebut, tanggung jawab lebih bersifat meminta untuk mencoba, melalui cara apa pun yang kita dapat, dari sekadar tahu sampai dengan mendukung satu sama lain, meringankan beban sesama, dan membuat dunia ini sebagai tempat yang lebih baik bagi semua orang. Pada akhirnya, sikap tanggung jawab ditekankan pada mengutamakan hal-hal yang hari ini dianggap penting sebagai suatu perbaikan di masa yang akan datang dengan didasari atas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Nilai tanggung jawab tentu sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi dimana nilai tanggung jawab akan dijadikan sebagai suatu bentuk pedoman bagi generasi mendatang terkait dengan suatu amanah baik berupa pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya agar dapat dilaksanakan dan dikerjakan secara baik dan bersungguh-sungguh. Ketika Individu dapat melaksanakan suatu tugas dan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab maka niscaya individu tersebut dapat menjadi penerus bangsa yang baik serta bermoral pula sebab nilai-nilai tanggung jawab terus ditumbuhkembangkan dalam diri Individu sebagai generasi penerus bangsa.

Selanjutnya nilai kejujuran, kejujuran dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nilai moral yang dalam

hubungannya dengan manusia misalnya tidak berbuat curang serta jujur dalam setiap bentuk interaksi di lingkungan keluarga dan masyarakat bahkan nilai jujur memiliki makna yang begitu besar bahkan di setiap agama di Indonesia begitu mengutamakan nilai kejujuran ini bagi pemeluk agamanya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia bahkan menempatkan jargon berani jujur itu hebat dalam slogan pemberantasan Korupsi nya, hal yang sederhana memang namun nilai kejujuran ini sangatlah penting karena dengan ditumbuhkembangkannya nilai kejujuran maka otomatis karakter individu tersebut akan menjadi individu yang baik dan terhindar dari perbuatan-perbuatan korupsi. Tanda dari salah satu arti kehidupan yang beradab. Kejujuran akan membentuk disiplin diri bagi kita untuk tidak mengikuti keinginan hati yang mengarah pada perendahan nilai diri atau perusakan diri, tetapi untuk mengejar hal-hal yang baik bagi diri kita, dan untuk mengejar keinginan sehat/positif dalam kadar yang sesuai. Kejujuran terhadap diri sendiri juga akan membentuk diri kita untuk tidak mudah puas terhadap apa yang telah diraih, dengan cara mengembangkan kemampuan, bekerja dengan manajemen waktu yang bertujuan positif, dan

menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan.

Hal yang serupa juga dimiliki oleh nilai-nilai yang lain, seperti tolong menolong, sikap peduli sesama, dan kerja sama yang membantu dalam menyelesaikan tanggung jawab terhadap etika yang berlaku secara luas. Menumbuhkan kembangkan jiwa tolong menolong memberikan bimbingan untuk berbuat kebaikan dengan hati. Sikap peduli sesama (dengan arti “berkorban untuk”) membantu kita untuk tidak hanya mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita, tetapi juga merasakannya. Sikap saling bekerja sama mengenal bahwa “tidak ada yang mampu hidup sendiri di dunia yang semakin sering berinteraksi dan membutuhkan maka kita harus bekerja secara bersama-sama dalam meraih tujuan yang pada dasarnya sama dengan tujuan bangsa dan negara ini. Beberapa bentuk lain, seperti kemauan untuk memiliki sikap moral, merupakan suatu perangkat bagi rasa hormat dan tanggung jawab. Sikap berani akan membantu para generasi muda untuk menghormati diri mereka sendiri agar dapat bertahan dalam berbagai tekanan teman-teman sebaya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan hidup mereka. Sikap berani juga membentuk kita semua untuk menghormati hak-hak orang lain ketika

kita menghadapi sebuah tekanan yang memaksa kita untuk bergabung pada sikap yang mengarah pada ketidakadilan.

Dengan kepercayaan terhadap semangat juang perubahan bangsa menjadi lebih baik tersebut, saat ini sekolah-sekolah di Negara lain misalnya di Amerika Serikat telah mulai mengedepankan pendidikan karakter bagi siswa-siswanya. (Lickona, 2016) Melalui contoh-contoh kedisiplinan baik dari para pendidik maupun kurikulum yang telah dibentuk seperti halnya di Indonesia, Pendidikan anti korupsi memang telah diajarkan dan masuk sebagai mata ajar di tingkat Perguruan tinggi namun menurut penulis nilai-nilai anti korupsi juga semestinya telah diberikan sejak di tingkat mendasar dalam bentuk mata ajar tersendiri sama halnya dengan yang diberikan di tingkat perguruan tinggi berupa Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Sekolah mulai di tingkat mendasar diharapkan juga membentuk siswa yang memiliki jiwa patriotisme, pekerja keras, jujur, cermat, peduli, dan berani yang semua itu mencerminkan nilai-nilai anti korupsi.

MATA PELAJARAN DALAM KURIKULUM DI INDONESIA		
TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)	TINGKAT SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SLTP)	TINGKAT SEKOLAH MENEGAH ATAS (SLTA)
<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan

<ul style="list-style-type: none"> • Budi Pekerti • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Matematika • Bahasa Indonesia • Ilmu Pengetahuan Alam • Ilmu Pengetahuan Sosial • Seni Budaya dan Prakarya (Termasuk Muatan lokal) • Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Termasuk Muatan lokal) • Bahasa Daerah (Sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing) 	<ul style="list-style-type: none"> • Budi Pekerti • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Matematika • Bahasa Indonesia • Ilmu Pengetahuan Alam • Ilmu Pengetahuan Sosial • Bahasa Inggris • Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater) • Pendidikan Jasmani dan Kesehatan • Prakarya (Rekayasa/Kerajinan/Budidaya/Pengolahan) • Bahasa Daerah (Sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing) • Bahasa Asing (Sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing) 	<ul style="list-style-type: none"> • Agama dan Budi Pekerti • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan • Matematika • Bahasa Indonesia • Bahasa Inggris • Sejarah Indonesia • Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater) • Pendidikan Jasmani dan Kesehatan • Prakarya (Rekayasa/Kerajinan/Budidaya/Pengolahan) <p>Serta Mata pelajaran Peminatan.</p>
---	--	---

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013

Jika melihat dari Tabel di atas maka tidak satupun Mata Pelajaran mulai tingkat Sekolah Dasar sampai Menengah Atas yang mengkhususkan pada Pendidikan Karakter terutama Mata pelajaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi sehingga diharapkan dengan berjalannya waktu, pendidikan konvensional yang bersifat klasik diharapkan dapat

berkembang terutama kaitan dengan upaya pencegahan Korupsi melalui bidang pendidikan melalui berbagai penanaman nilai Moral berupa Pendidikan Anti Korupsi sebagai salah satu mata pelajaran di setiap tingkatan Pendidikan di Indonesia. Karena hakikatnya keinginan bersama bahwa kurikulum memudahkan semua guru untuk melakukan pembelajaran, maka semua kebijakan pemerintah tentang kurikulum harus mudah dipahami, mudah dijabarkan, mudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi yang ada di sekitarnya (*flexible*), mudah dikelola oleh guru (*manageable*), terukur ketercapaiannya (*measurable*), terlihat tahapan perkembangannya (*observable*) dan dapat diprediksi hasilnya (*predictable*).

Jika melihat sistem Pendidikan di Indonesia telah tiga kali diadakan perubahan Undang-Undang tentang sistem pendidikan di Indonesia, tujuh kali pula telah dilakukan perubahan kurikulum, dan tiga kali perubahan dalam sistem penentuan kelulusan (ujian akhir) tampaknya tidak berpengaruh pada model pembelajaran dan suasana kependidikan yang memungkinkan sekolah sebagai pusat kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun

kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat, dan menghafal (*rote learning*), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan UNESCO, yang terkenal dengan empat pilar belajar, yakni, "*learning to know*" "*learning to do*" "*learning to live together*" dan "*learning to be*". Berbagai pembaharuan pendidikan telah dilakukan. Antara lain adalah dengan mengubah sistem ujian negara, yang fungsinya memilih dan memilah di antara peserta didik yang di satu pihak berhasil menyaring peserta didik untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, tetapi di lain pihak mengabaikan mayoritas peserta didik yang secara akademik kurang berpotensi. Praktik semacam ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip pendidikan demokrasi dan memperkuat pendidikan yang elitis dan aristokratik.

Berkaitan dengan hal tersebut para pendukung teori Darwin misalnya mengatakan bahwa kehidupan biologis yang muncul saat ini merupakan hasil dari produk evolusi. Pandangan tersebut mengantarkan masyarakat untuk melihat hal lain yang berbeda, termasuk sikap moral yang lebih bersifat berkembang daripada kaku atau bersifat benar atau salah. Teori lain misalnya yang dikemukakan oleh *Einstein* tentang Teori relativitas meskipun lebih ditunjukkan

untuk menjelaskan beberapa konsep fisika, ternyata juga memengaruhi pemikiran tentang pendidikan moral.

Selain itu Jika melihat pada kompleksitas persoalan yang ada di negara ini, kemerosotan moral ternyata tidak hanya terjadi pada tingkatan yang besar seperti berbagai perbuatan Korupsi. Secara umum, masyarakat berpandangan bahwa semakin meluasnya nilai individualisme yang menekankan pada kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang banyak telah melahirkan sifat keegoisan yang menjadi gaya hidup yang harus dihargai keberadaannya. Seperti halnya di negara kita begitu banyak kesenjangan yang terjadi antara si Kaya dan Si miskin, banyak orang bahkan telah skeptis dan memiliki pemikiran yang sama misalnya menganggap bahwa “Setiap orang juga telah menyimpangkan sistem yang telah berlaku, dan saya akan menjadi orang bodoh jika tidak mengikuti berbagai perilaku tersebut.” Sebagai bukti bahwa semakin banyaknya orang yang menjadi pelanggar aturan, Dr. Gerald Ellison, seorang psikolog dari University of Southern California, yang memiliki spesialisasi di bidang perkembangan moral mengutip peningkatan jumlah tindak pencurian yang dilakukan oleh para pegawai dan juga peningkatan sejumlah penipuan dalam kualifikasi kerja, seperti

penipuan dalam membuat resume lamaran kerja.

Sejauh ini, evaluasi umum dalam bentuk program pendidikan moral ini sebagai contoh telah dilaksanakan di Negara Amerika oleh sebuah badan yang dinamakan Projek Peningkatan Kualitas Anak-anak yang berada di California (*Child Development Project*) disingkat CDP. (Lickona, 2016) Bahkan Hewlett Foundation telah mendukung upaya CDP untuk melibatkan sebuah kelompok yang terdiri dari para peneliti di bidang psikologi yang telah mengumpulkan sejumlah data yang sangat banyak untuk kemudian ditujukan untuk menjawab pertanyaan misalnya apakah sebuah program pendidikan moral yang menyeluruh, yang dilaksanakan dari tingkat paling kecil misal di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan terus berlanjut sampai dengan tingkat Sekolah Dasar, dapat menghasilkan dampak positif yang terukur dan bertahan lama dalam hal pemikiran moral, tingkah laku, dan sikap anak-anak.

Dalam menyusun rancangan penelitian tersebut, CDP mengajukan penawaran kepada 13 Sekolah Dasar di San Ramon, lalu diambilah 6 sampel Sekolah Dasar yang begitu antusias untuk terlibat di dalamnya. Enam sekolah tersebut kemudian dibagi menjadi dua

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari tiga sekolah (semua sekolah tersebut memiliki ukuran dan tingkat ekonomi sosial yang setara). Lima tahun kemudian, laporan hasil belajar anak-anak yang bersekolah dengan program CDP menunjuk ke arah yang lebih positif. Hasil belajar tersebut didapat dari seluruh siswa yang telah berpartisipasi sejak mereka duduk di bangku TK sampai mereka duduk di kelas 4 SD (5 Tahun). Secara umum hasil dari Program CFD tersebut menunjukkan beberapa hal positif yaitu :

1. Sikap terhadap kegiatan pembelajaran kelas:

Para siswa menunjukkan sikap yang lebih spontan dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. kerja sama. saling mengasihi dan menyayangi, serta sikap saling mendukung antar kelas;

2. Sikap dalam penggunaan arena bermain sekolah

Para siswa terlihat lebih mau berbagi dengan siswa lain di area bermain, sedangkan siswa di sekolah pembanding masih cenderung bersikap menang sendiri;

3. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang bersifat sosial

Dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul, para siswa lebih mendasari perhatian mereka pada penyelesaian yang melibatkan kesepakatan bersama bukanlah penyelesaian yang terlalu agresif dan terburu-buru yang tentunya menghasilkan sebuah penyelesaian alternatif yang lebih terencana;

4. Komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi

Para siswa lebih berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, seperti meyakini bahwa setiap orang dalam kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan dan kegiatan yang akan dibuat. (Lickona, 2016)

Hasil lain yang diperoleh dari Program tersebut yaitu prestasi yang telah mereka raih di atas sama sekali tidak mengorbankan prestasi akademik yang mereka raih. Sebuah hasil yang begitu diperhitungkan pada masa yang pencapaian akademik menjadi suatu tekanan utama di dunia pendidikan. Anak-anak dalam program CDP memiliki nilai yang sama bagusnya dengan siswa kelas lainnya dan telah mencapai standar pengukuran keberhasilan sekolah yang berlaku di California.

Bahkan hasil-hasil studi dibidang neurologi mengetengahkan antara lain

bahwa perkembangan kognitif anak telah mencapai 50 % ketika anak berusia 4 tahun, 80 % ketika anak berusia 8 tahun, dan genap 100 % ketika anak bertuda berusia 18 tahun. Studi tersebut makin menguatkan pendapat para ahli sebelumnya, tentang keberadaan masa peka atau masa emas (*golden age*) pada anak-anak usia dini. (Liestyasari, 2013) Masa emas perkembangan anak yang datang hanya sekali seumur hidup tidak boleh disia-siakan. Hal itu yang memacu makin mantabnya anggapan bahwa sesungguhnya pendidikan yang dimulai setelah usia Sekolah dasar (SD) tidaklah benar. Oleh karena itu pendidikan harus dimulai sejak dini. Semakin dini anak dipersiapkan untuk dididik semakin mantap pula ketika menghadapi masa depan. Karena semakin kaya lingkungan yang dia pelajari semakin kaya stimulasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanaman nilai moral sejak dini seperti halnya nilai-nilai anti korupsi bahkan sangat berpengaruh terhadap anak didik di masa depan. Kiranya sebagai bangsa yang juga tengah didera penyakit kronik Korupsi ini kita dapat menjadikan contoh tersebut sebagai bagian dari upaya dini pendidikan karakter anti korupsi yang dapat dilakukan di tingkat pendidikan di Negara kita.

KESIMPULAN

Pendidikan Karakter Anti Korupsi menjadi hal yang mendesak untuk diberikan mulai di tingkat sekolah dasar sampai Menengah di Indonesia selain mata pelajaran konvensional yang menjadi target pengajaran di setiap sekolah di Negara Indonesia. Pengaplikasian program pendidikan karakter Anti Korupsi, melalui penyusunan tahapan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi mulai sejak dini yang melibatkan orang tua dan guru menjadi hal yang penting. Lebih jauh diharapkan sekolah dari tingkat dasar sampai menengah secara luas dapat ikut terlibat dalam program pendidikan karakter anti korupsi dan menjadikan program yang dimaksud sebagai program khusus dan menjadi prioritas bagi setiap daerah di Indonesia. Misalnya saja salah satu contoh ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Negara Indonesia yaitu Nadiem Makarim membuat salah satu kebijakan di bidang pendidikan yang disebut Merdeka Belajar dengan cara mengutamakan etika bagi anak didik tidak hanya prestasi semata karena berbagai nilai etika dan moral yang sangat jelas penting untuk kebaikan kehidupan baik secara individu maupun masyarakat dan bangsa Indonesia di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Coleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kirschenbaum, H. (1995). *100 Ways To Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*. Needham Heights: Ilyn & Bacon/Simon & Schuster Educational Group.
- KPK, A. (2016). Retrieved from aclc.kpk.go.id:
<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-a-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>
- Lickona, T. (2016). *Character Matters (Persoalan Karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, Integritas dan Kebajikan Penting lainnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Liestyasari, S. I. (2013). *Reproduksi Kekerasan di Kalangan Siswa SD dan Implikasinya Bagi Pendidikan Karakter di Kota Surakarta*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Martin. (2004). Retrieved from <http://e-jurnalpendidikan.blogspot.com>.
- Nasional, K. H. (2013). *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Nelson, W. N. (2019). *Nelson, William N. Morality: What's In It For Me?: A Historical Introduction To Ethics*. Colorado: Westfive Press, Inc.
- Rohendi, E. (2011). Pendidikan Karakter Di Sekolah. *Edu Humaniora*, 3(1).
- Savitri, A. (2019). *Savitri, Astrid. Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta: Genesis.
- Setiawati, A. N. (2017). Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun. 1*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisa Politik Hukum dalam masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).
- Wikipedia. (2013). Retrieved from Wikipedia:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013